

**PENGARUH INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA
TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN TINGKAT
KEMISKINAN PADA WILAYAH SARBAGITA DI PROVINSI BALI**

Gusti Ayu Putu Ambara Ratih¹

Made Suyana Utama²

I Nyoman Mahaendra Yasa³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: ambara.ratih1102@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang mendasar dan pusat perhatian di negara manapun. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak hanya dialami oleh negara yang berkembang, namun juga bagi negara maju termasuk Indonesia tidak terkecuali Provinsi Bali terutama di wilayah Sarbagita. Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, baik dalam skala nasional maupun lokal. Penurunan tingkat kemiskinan bisa dilihat melalui pencapaian Produk Domestik Regional Bruto pada daerah tersebut. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto pada wilayah Sarbagita sangat tergantung kepada realisasi investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja yang terserap. Tingginya investasi dan pengeluaran pemerintah pada wilayah serbagita akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto pada wilayah tersebut, dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan selanjutnya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: *Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan.*

ABSTRACT

Poverty is one of the fundamental problems in any country. Poverty is not only experienced by the developing countries, but also for developed countries including Indonesia, especially in the Region of Sarbagita in the Province of Bali. The decline in the poverty rate could be seen through from Gross Domestic Regional Product (GDRP). GDRP dependent on the realization of investments Investment, Government Expenditure and Labor. The high Investment and Government Expenditure on Region of Sarbagita will increase Gross Domestic Regional Product (GDRP) and influenced to the public welfare and will further reduce the level of poverty.

Keywords: Investment, Government Expenditure, Labor, Gross Domestic Regional Product (GDRP) and Poverty Level

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Krisis global menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kinerja neraca pembayaran yang menurun, tekanan kepada nilai tukar rupiah, dan dorongan pada laju inflasi (Adhisasmita. 2005). Dampak dari krisis global selama ini hanya membawa angka kemiskinan di Indonesia kembali meningkat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang mendasar dan pusat perhatian di negara manapun (Sulilowati, 2008). Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak hanya dialami oleh negara yang berkembang, namun juga bagi negara maju yang telah memiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai (Cheyne, Christine, dkk, 1998).

Bangsa Indonesia sejak merdeka sudah berupaya untuk mengurangi kemiskinan namun hasilnya jauh dari memuaskan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat investasi yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat (Elyani. 2010). Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar (Sianturi, 2011).

Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung telah dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun local (Ernawati, 2012). Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga yang sangat miskin

(Mahsunah, 2013). Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang bersifat multidimensional dan merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya (Suryawati, 2005).

Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sejumlah 35,1 juta (15,9 persen). Tahun 2006 keadaan semakin memburuk, terjadi guncangan ekonomi cukup dahsyat di Indonesia yang menyebabkan meningkatnya jumlah kemiskinan sekitar 39,3 juta (17,75 persen), hal itu terjadi karena pemerintah menaikkan harga BBM (BPS, 2011). Tetapi keadaan semakin lama semakin membaik, terbukti di tahun 2007 ditandai dengan jumlah penduduk miskin menurun cukup signifikan hingga 2014 (BPS, 2015). Usaha pemerintah dalam bentuk program-program yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan cukup berhasil terbukti semakin bertambahnya angka pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, maka angka kemiskinan trennya semakin menurun signifikan setiap tahunnya. Permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah nasional saja, tetapi daerah di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Bali.

Data BPS Provinsi Bali tahun 2005-2014 tingkat kemiskinan di Provinsi Bali secara umum mengalami tren yang menurun. Tetapi, dalam periode tersebut, hanya dari tahun 2005-2006 saja yang menunjukkan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,36 persen atau 15.100 jiwa, dari angka sebelumnya sebesar 6,72 persen menjadi 7,08 persen. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin di tahun 2006 ternyata disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah. Setelah tahun 2007 sampai 2014, angka kemiskinan di Provinsi Bali menunjukkan tren yang menurun cukup signifikan.

bila dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, angka kemiskinan di Provinsi Bali ternyata masih jauh lebih kecil dengan angka kemiskinan nasional, meskipun demikian pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dipengaruhi oleh potensi yang ada pada setiap kabupaten/kota, potensi yang paling berkembang pesat di Provinsi Bali adalah pariwisata dan pertanian. Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2005-2014
(%)

Kabupaten Kota	Tahun									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jembrana	7.04	9.11	10.49	9.92	7.97	8.11	6.80	6.56	5.56	5.74
Tabanan	8.59	9.23	7.84	7.45	6.92	6.96	4.99	5.62	5.21	4.90
Badung	5.00	5.25	4.57	4.28	3.28	3.23	3.28	2.62	2.46	2.16
Gianyar	7.22	5.09	6.33	5.98	6.68	6.68	5.76	5.40	4.27	4.69
Klungkung	7.55	8.15	9.52	9.14	7.03	7.58	5.23	6.10	7.01	5.37
Bangli	6.25	6.69	7.87	7.48	6.12	6.41	5.18	5.16	5.45	4.52
Karangasem	6.51	7.67	9.42	8.95	7.67	7.95	6.37	6.43	6.88	5.63
Buleleng	10.13	9.2	9.18	8.68	7.45	7.35	5.95	5.93	6.31	5.19
Denpasar	2.95	2.16	2.59	2.10	2.19	2.21	2.20	1.79	2.07	1.52
Provinsi Bali	6,85	6,72	7,08	6,63	5,85	5,67	4,88	4,59	4,49	3,95

Sumber: BPS Provinsi Bali 2006-2015

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki tingkat kemiskinan yang paling rendah di kawasan regional Sarbagita. Hal ini dikarenakan kedua wilayah ini saling berinteraksi dan memiliki daerah terluas serta jauh lebih berkembang dari pada wilayah lainnya, sektor pariwisata yang sangat berkembang pada wilayah ini yang menyebabkan banyak penduduk yang bekerja disektor pariwisata

sehingga menjadikan kawasan ini memiliki kemajuan yang pesat. Sektor pariwisata memiliki kontribusi terbesar dan menyumbang pendapatan paling tinggi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Rendahnya tingkat kemiskinan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, tidak sebanding dengan tingkat kemiskinan yang masih terlihat kurang seimbang yakni pada Kabupaten Gianyar dan Tabanan. Meskipun kedua kabupaten ini merupakan kabupaten yang termasuk dalam kawasan Regional Sarbagita namun apabila dilihat dari tingkat kemiskinannya ternyata masih kalah dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan bahkan di Kabupaten Tabanan memiliki rata-rata tingkat kemiskinan yang masih berada diatas kemiskinan di Provinsi Bali.

Rendahnya tingkat kemiskinan Kabupaten Gianyar dan Tabanan karena wilayah ini kurang mengembangkan sektor yang ada pada wilayah tersebut. Kabupaten Gianyar yang memiliki daerah wisata religi yang sangat banyak kurang mengembangkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada pada wilayah tersebut. Tidak hanya Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan yang memiliki potensi besar sektor pertanian, pada saat ini sektor pertanian di Kabupaten Tabanan kurang diberdayakan sehingga potensi sektor pertanian pada wilayah ini mengalami penerununan. Investasi dan pengeluaran pemerintah yang terjadi diwilayah Sarbagita berfokus pada pariwisata, dimana pariwisata hanya berkembang pesat diwilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Para investor lebih cenderung menanamkan modal pada wilayah yang sudah memiliki akses dan infrastruktur yang lebih baik, sehingga tenaga kerja yang terserap jauh lebih banyak pada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Seharusnya wilayah Sarbagita yang merupakan wilayah yang berintegrasi dan wilayah metropolitan yang menjadi wilayah percontohan dalam pembangunan dan kesehjahteraannya paling tinggi, ternyata pada pada wilayah ini

tingkat kemiskinan pada beberapa kabupaten seperti Gianyar dan Tabanan masih sangat tinggi dibandingkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Sesuai pada tujuan awal yakni, kawasan regional Sarbagita ini dibentuk dengan sudut pandang kepentingan ekonomi yang berbasis kegiatan pariwisata dan berbentuk kawasan metropolitan. Yaitu manfaat dari konsep metropolitan antara lain adalah untuk memacu pertumbuhan- pertumbuhan daerah-daerah *hinterland* dari pusat pertumbuhan itu sendiri agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wheeler (2004) di Metropolitan Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan dan garis kemiskinan. Namun penemuan ini bertentangan dengan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Danielson dan Wolpert (1992) di New Jersey bagian utara dan Sugie Lee *et al.* (2013) di New Jersey. Mereka menyimpulkan bahwa pembangunan regional menimbulkan ketimpangan ekonomi antar kota itu sendiri. Sehingga berdasarkan data yang ditunjukkan dalam tabel 1 dan perbedaan hasil penelitian diatas, maka penelitian yang dilakukan di kawasan regional Sarbagita ini akan menjadi penting dan menarik untuk diteliti.

Peranan para pelaku ekonomi tidak akan pernah lepas dalam mensejahterakan masyarakat dari jerat kemiskianan dan kemajuan ekonomi yakni pemerintah yang berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta yang berperan dalam pengembangan investasi dan masyarakat yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian (Gravitiani, 2006). Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Abu Dabe (2003),

pengeluaran pemerintah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang dicapai (Lewis, 1954). Dalam perkembangannya, alat indikator ini tidak saja berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB tetapi juga melibatkan seberapa tinggi tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan (Nizar, 2013).

Disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah proses pembangunan nasional juga ditentukan oleh investasi. Pembangunan nasional merupakan salah satu cara membuka pintu investasi bagi investor (Lubis, dkk. 2008). Pengaruh investasi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja masih akan berpengaruh terhadap hal lain. Setelah meningkatnya penyerapan tenaga kerja maka diharapkan terjadi peningkatan produksi yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan PDRB (Hugan, 2012.). Peningkatan investasi dapat dipastikan akan memperbesar jumlah lapangan pekerjaan sehingga peningkatan investasi diharapkan dapat diikuti dengan meningkatnya penyerapan jumlah tenaga kerja (Herman, 2011).

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Berbagai strategi dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan pelaksanaan pelaksanaan program pro-rakyat serta memberikan sarana yang memadai untuk mampu mengakses dan memenuhi berbagai pelayanan

kebutuhan masyarakat seperti program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), bedah rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) dan penyediaan angkutan umum murah seputaran kabupaten kota yang berpotensi sebagai penggerak roda ekonomi (Astrini, 2013). Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali dipengaruhi oleh potensi yang ada pada setiap kabupaten/kota, potensi yang paling berkembang pesat di Provinsi Bali adalah pariwisata dan pertanian.

Daerah perkotaan yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi (Omoniyi. B, dkk, 2011). Perkembangan investasi di Bali dapat dilihat melalui investasi fisik pembentukan modal tetap domestik bruto. Investasi fisik sangat dominan di beberapa daerah maju seperti di Wilayah Sarbagita. Besarnya investasi fisik di daerah ini tidak lepas dari pengaruh sektor pariwisata yang memang menjadi tulang punggung perekonomian di daerah tersebut (Omr, Kahouli. 2013).. Keengganan investor berinvestasi di sektor lain seperti pertanian, membuat kabupaten lain sulit menyaingi daerah Sarbagita dalam menarik investasi (Rondinelli, dkk. 1990). Ketersediaan infrastruktur yang lebih baik di daerah ini juga menjadi pendorong investasi yang cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun pusat untuk mengarahkan investasi secara lebih merata nampaknya menunjukkan hasil (Omoniyi, 2011).

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi (Pascual, 2006) . Investasi merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang bernasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak baik (Fatas A,

dkk, 1998.). Berdasarkan penjas sebelumny distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja mungkin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Gatot, 2013). Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, maka judul dalam penelitian ini adalah “ Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Kesempatan Kerja Terhadap PDRB dan Tingkat Kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali”.

Dari latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap tenaga kerja pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali?. 2)Bagaimanakah pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali?. 3)Bagaimanakah pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali?. 4) Adakah pengaruh tidak langsung investasi, pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui tenaga kerja pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali?. 5) Adakah pengaruh tidak langsung investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali?.

Tujuan peneltian yaitu : 1) Untuk menganalisis pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap tenaga kerja pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) selama periode Penelitian. 3) Untuk menganalisis pengaruh

investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. 4) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung investasi, pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui tenaga kerja pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. 5) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada wilayah Sarbagita di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Regional Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Hal ini dilihat dari tingkat kemiskinan di Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun 2001-2014, khususnya kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling rendah adalah di wilayah Sarbagita. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki tingkat kemiskinan yang paling rendah di kawasan regional Sarbagita

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap PDRB dan tingkat kemiskinan di Kawasan Regional Sarbagita.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Tingkat Kemiskinan (Y_2) adalah suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi standar hidup minimum pada kurun waktu 2001-2014 yang dinyatakan dalam persentase.

- 2) Produk Domestik Regional Bruto (Y_1) adalah total nilai produksi barang dan jasa per kapita yang diproduksi di wilayah (regional) di wilayah Sarbagita dalam kurun waktu 2001-2014 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah
- 3) Investasi (X_1) adalah pembentukan modal tetap bruto per kapita yang digunakan untuk pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri yang dinyatakan dalam jutaan rupiah
- 4) Pengeluaran pemerintah (X_2) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah di wilayah Sarbagiata, baik oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD per kapita yang dinyatakan dalam jutaan rupiah
- 5) Tenaga kerja (X_3) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat yang dinyatakan dalam satuan jiwa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data *panel* (tahun 2001-2014). Sumber data penelitian merupakan data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh dari sumbernya langsung, tetapi diperoleh dari sumber- sumber lain baik melalui individu maupun dokumen (Sugiyono, 2010). Data investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan diperoleh dari Dinas Pendapatan kabupaten/kota di wilayah Serbagita, BPS Badung, BPS Gianyar, BPS Tabanan, BPS Denpasar dan BPS Provinsi Bali

Metode Pengumpulan Data

Seluruh data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan observasi nonpartisipan adalah metode observasi nonpartisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung dokumen yang dikeluarkan oleh instansi berwenang seperti Laporan BPS pada Kawasan Regional Sarbagita serta Dinas Pendapatan pada Kawasan Regional Sarbagita dan wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka. Pada penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan pihak BPS pada Kawasan Regional Sarbagita serta Dinas Pendapatan pada Kawasan Regional Sarbagita.

Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode analisis, yaitu statistik deskriptif, analisis jalur (*Path Analysis*) dengan *Partial Least Square PLS (component based SEM)*

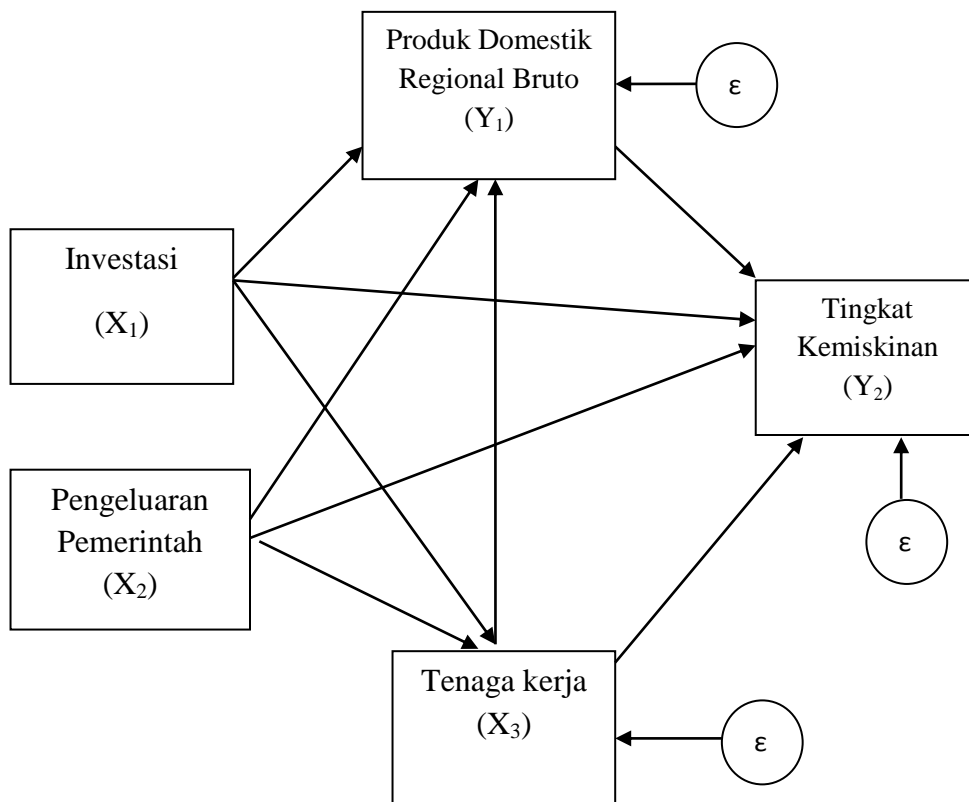
Analisis deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dengan menerapkan statistik deskriptif untuk menghitung rata-rata, tabel-tabel, gambar-gambar dan sebagainya yang dibuat atau dihitung dengan program aplikasi SPSS maupun Microsoft Excel.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan *soft ware Partial Least Square (PLS)* dan SPSS. Analisis jalur merupakan perluasan penerapan analisis regresi linear berganda untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel (model kasual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Dalam analisis jalur terdapat suatu variable yang berperan ganda

yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain. Bentuk hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan sistem secara simultan. Kerlinger (2002) menyebutkan bahwa dengan menggunakan analisis jalur akan dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel.



Gambar 1 Diagram Jalur

Gambar 1. Bertujuan mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable terikat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan menggunakan *soft ware Partial Least Square (PLS)* dan SPSS. Berdasarkan Gambar 1, penelitian pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali dapat diilustrasikan ke dalam jalur seperti pada Gambar 1. Dapat dijelaskan bahwa investasi (X_1) dapat berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan (Y_2), dapat juga pengaruhnya tidak langsung melalui PDRB (Y_1) terlebih dahulu kemudian ke tingkat kemiskinan (Y_2). Pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan (Y_2), tetapi dapat juga pengaruhnya tidak langsung yaitu melalui PDRB (Y_1) terlebih dahulu kemudian ke tingkat kemiskinan (Y_2). Begitu Pula dengan tenaga kerja (X_3) dapat berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan (Y_2), tetapi dapat juga pengaruhnya tidak langsung yaitu melalui PDRB (Y_1) terlebih dahulu kemudian ke tingkat kemiskinan (Y_2). Untuk mengetahui pola hubungan masing- masing variabel berdasarkan Gambar 1, dapat dibuat sistem persamaan struktural sebagai berikut:

$$X_3 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots (4.1)$$

$$Y_1 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 X_3 + \varepsilon_2 \dots\dots\dots (4.2)$$

$$Y_2 = \beta_6 X_1 + \beta_7 X_2 + \beta_8 X_3 + \beta_9 Y_1 + \varepsilon_3 \dots\dots\dots (4.3)$$

Keterangan :

- X_1 = Investasi
- X_2 = Pengeluaran Pemerintah
- X_3 = Tenaga Kerja
- Y_1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- Y_2 = Tingkat Kemiskinan
- β_1 adalah koefisien jalur X_1 dengan X_3
- β_2 adalah koefisien jalur X_2 dengan X_3
- β_3 adalah koefisien jalur X_1 dengan Y_1
- β_4 adalah koefisien jalur X_2 dengan Y_1
- β_5 adalah koefisien jalur X_3 dengan Y_1
- β_6 adalah koefisien jalur X_1 dengan Y_2
- β_7 adalah koefisien jalur X_2 dengan Y_2
- β_8 adalah koefisien jalur X_3 dengan Y_2
- β_9 adalah koefisien jalur Y_1 dengan Y_2

$\varepsilon_1, \varepsilon_2,$ dan $\varepsilon_3 = \text{inner residual}$

HASIL ANALISIS DATA

Evaluasi Terhadap Pemenuhan Asumsi Analisis Jalur

Pemeriksaan terhadap pemenuhan asumsi yang melandasi analisis jalur perlu dilakukan agar hasilnya memuaskan. Asumsi yang melandasi analisis jalur adalah sebagai berikut. Di dalam model analisis jalur hubungan antar variabel adalah linier dan aditif. Uji linieritas menggunakan *curve fit*. Hasil olahan data dengan SPSS ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Hubungan Linier Antar Variabel Penelitian

Hubungan Variabel	R Square	F	df1	df2	Sig
X1-→ X3	0,251	18,109	1	54	0,000
X2 →X3	0,082	24,838	1	54	0,032
X1 →Y1	0,506	55,348	1	54	0,000
X2 →Y1	0,279	20,919	1	54	0,000
X3 →Y1	0,472	48,216	1	54	0,000
X1 →Y2	0,561	69,037	1	54	0,020
X2 →Y2	0,421	39,264	1	54	0,031
X3 →Y2	0,648	99,239	1	54	0,000
Y1 →Y2	0,800	216,549	1	54	0,000

Sumber: Hasil Olahan Penelitian 2016

Keterangan :

- Y₂ : Tingkat Kemiskinan
- Y₁ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- X₁ : Investasi
- X₂ : Pengeluaran Pemerintah
- X₃ : Tenaga Kerja

- (1) Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa semua variabel berhubungan secara linier satu dengan lainnya. Hasil ini ditunjukkan oleh signifikansi yang kurang

dari 0,05. Hubungan yang paling linier adalah antara Y_1 dengan Y_2 , yaitu ditunjukkan oleh F hitung paling besar, yaitu sebesar 216,549.

- (2) Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah, sedangkan pada model yang mengandung kausal resiprokal tidak dapat dilakukan analisis jalur. Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa tidak ada anak panah yang bolak-balik antar variabel penelitian, sehingga model yang dianalisis adalah rekursif dan layak menggunakan analisis jalur.
- (3) Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval. Dalam penelitian ini semua variabel endogen berskala rasio, yaitu: tenaga kerja dalam satuan jiwa, PDRB perkapita dalam jutaan rupiah dan tingkat kemiskinan dalam persentase.
- (4) Pengamatan diukur tanpa kesalahan, karena data yang digunakan dalam skala rasio, maka dalam penelitian sudah layak digunakan dalam analisis jalur, meskipun tidak diuji validitas dan reliabelitasnya

Pengaruh Langsung (*Path Coefficient*)

Berdasarkan hasil olahan data, didapat hasil pengaruh langsung (*path coefficient*). Hasil olah data pengaruh langsung (*path coefficient*) variabel terhadap variabel lainnya dalam penelitian disajikan pada Tabel 3,

Tabel 3
Pengaruh Langsung Antar Variabel Penelitian

Hubungan Variabel	Coefficient	Standard Error	T Statistics	P. value	Keterangan
X1-→ X3	0,321	0,141	2,268	0,024	Positif dan Signifikan
X2 →X3	0,599	0,079	7,625	0,000	Positif dan Signifikan
X1 →Y1	0,545	0,068	7,982	0,000	Positif dan Signifikan

X2 →Y1	0,575	0,066	8,656	0,000	Positif dan Signifikan
X3 →Y1	0,003	0,078	0,033	0,974	Positif dan NonSignifikan
X1 →Y2	-0,158	0,070	2,253	0,025	Negatif dan Signifikan
X2 →Y2	-0,200	0,086	2,313	0,021	Negatif dan Signifikan
X3 →Y2	-0,232	0,047	4,897	0,000	Negatif dan Signifikan
Y1 →Y2	-0,484	0,120	4,020	0,000	Negatif dan Signifikan

Sumber: Lampiran 3

Keterangan:

X_1 = Investasi

X_2 = Pengeluaran Pemerintah

X_3 = Tenaga Kerja

Y_1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

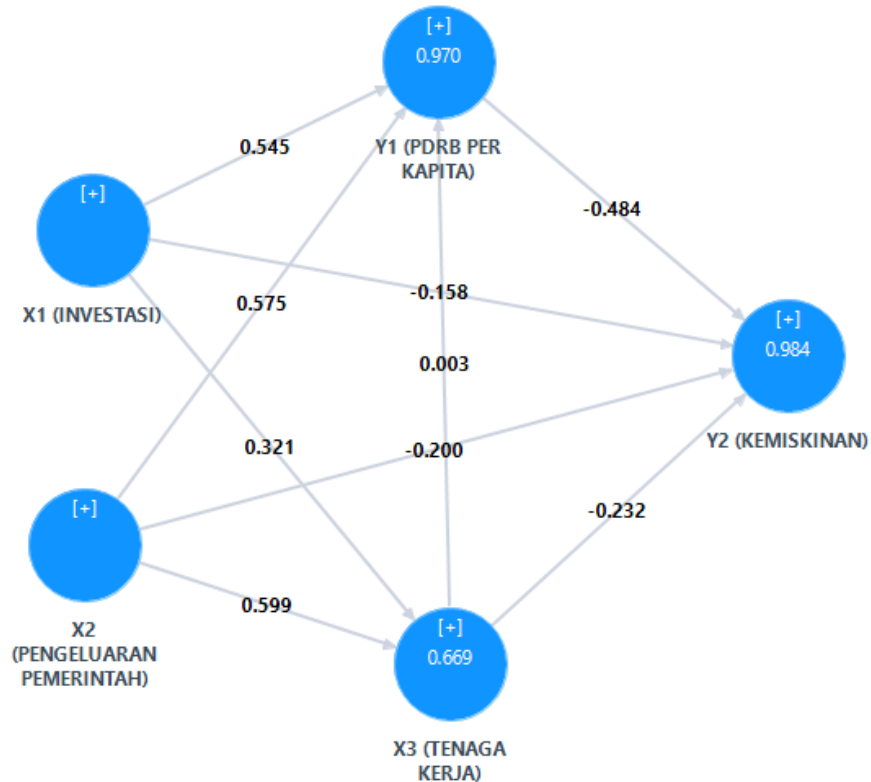
Y_2 = Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengaruh investasi (X_1) terhadap tenaga kerja (X_3) dengan *coefficient* sebesar 0,321, dengan *standard error* 0,141 dan *P. Value* sebesar $0,024 < 0,05$ maka Hipotesis diterima, yakni Jumlah Kunjungan investasi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja (X_3). Pengaruh pengeluaran pemerintah (X_2) terhadap tenaga kerja (X_3) dengan *coefficient* sebesar 0,599 dengan *standard error* 0,079 dan *P. Value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka Hipotesis diterima, yakni pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja (X_3). Pengaruh investasi (X_1) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y_1) dengan *coefficient* sebesar 0,545 dengan *standard error* 0,068 dan *P. Value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka Hipotesis diterima, yakni investasi (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1). pengeluaran pemerintah (X_2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) dengan *coefficient* sebesar 0,575 dengan *standard error* 0,066 dan *P. Value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka Hipotesis diterima, yakni pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1). Pengaruh tenaga kerja (X_3) terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) dengan *coefficient* sebesar 0,003 dengan *standard error* 0,078 dan *P. Value* sebesar $0,000 < 0,974$ maka Hipotesis tidak diterima, yakni tenaga kerja (X_3) berpengaruh positif dan nonsignifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1).

Berdasarkan Tabel 3 pengaruh investasi (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) dengan *coefficient* sebesar -0,158 dengan *standard error* 0,070 dan *P. Value* sebesar $0,025 < 0,05$ maka Hipotesis diterima, yakni investasi (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y_2). Pengaruh pengeluaran pemerintah (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) dengan *coefficient* sebesar -0,200 dengan *standard error* 0,086 dan *P. Value* sebesar $0,021 < 0,05$ maka Hipotesis diterima, yakni pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y_2). Pengaruh tenaga kerja (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) dengan *coefficient* sebesar -0,232 dengan *standard error* 0,047 dan *P. Value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka Hipotesis diterima, yakni tenaga kerja (X_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y_2). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) dengan *coefficient* sebesar -0,484 dengan *standard error* 0,120 dan *P. Value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima, yakni Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y_2).

Bedasarkan Tabel 3 hubungan antar variable penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2
Koefisien Jalur Hubungan Antarvariabel Penelitian

Berdasarkan Gambar 2 dan juga Tabel 3 dapat dibuat estimasi persamaan struktural sebagai berikut:

$$X_3 = 0,321X_1 + 0,599X_2$$

$$Y_1 = 0,545X_1 + 0,575X_2 + 0,003X_3$$

$$Y_2 = -0,158X_1 - 0,200X_2 - 0,232X_3 - 0,484Y_1$$

Keterangan :

X_1 = Investasi

X_2 = Pengeluaran Pemerintah

X_3 = Tenaga Kerja

Y_1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Y_2 = Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Gambar 2 dan juga Tabel 3 variabel yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap tenaga kerja (X_3) adalah variabel pengeluaran pemerintah (X_2) sebesar 0,599 dan disusul dengan investasi (X_1) sebesar 0,321. Pada variabel Produk Domestik

Regional Bruto perkapita (Y_1) variabel yang mempunyai pengaruh terbesar adalah pengeluaran pemerintah (X_2) sebesar 0,575, kemudian disusul oleh investasi (X_1) sebesar 0,545 dan terkecil adalah tenaga kerja (X_3) sebesar 0,003. Pihak lain pada variabel tingkat kemiskinan (Y_2) variabel terbesar yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan adalah investasi (X_1) sebesar -0,158, kemudian pengeluaran pemerintah (X_2) sebesar -0,200, variabel tenaga kerja (X_3) sebesar -0,232 dan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) sebesar -0,484.

Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Pengaruh tidak langsung suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Pengaruh Tidak Langsung Variabel Penelitian

Hubungan	Variabel	Coefficient	Std. Err	T.	P Value	Keterangan
Antarvariabel	Mediasi			Statistik		
$X_1 \rightarrow Y_1$	X_3	0,001	0,035	0,024	0,981	Nonsignifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	X_3	0,002	0,046	0,034	0,973	Nonsignifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	Y_1	-0,338	0,079	4,299	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	Y_1	-0,418	0,084	5,003	0,000	Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_2$	Y_1	-0,001	0,041	0,030	0,976	Nonsignifikan

Sumber: Lampiran 3

Keterangan:

- X_1 = Investasi
- X_2 = Pengeluaran Pemerintah
- X_3 = Tenaga Kerja
- Y_1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- Y_2 = Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa pengaruh variabel investasi (X_1) terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) melalui tenaga kerja (X_3),

dengan t statistik sebesar 0,024 atau dengan probabilitas sebesar 0,981. Hal ini berarti bahwa variabel tenaga kerja (X_3) tidak berperan memediasi pengaruh variabel investasi (X_1) terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1). Variabel pengeluaran pemerintah (X_2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) melalui tenaga kerja (X_3), dengan t statistik sebesar 0,034 atau dengan probabilitas sebesar 0,973. Hal ini berarti bahwa variabel tenaga kerja (X_3) tidak berperan memediasi pengaruh variabel pengeluaran pemerintah (X_2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1). Pengaruh variabel investasi (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) melalui Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1), dengan t statistik sebesar 4,299 atau dengan probabilitas sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) berperan memediasi pengaruh variabel investasi (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2). Oleh karena variabel investasi (X_1) berpengaruh langsung secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y_2), dan juga setelah dimediasi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) juga signifikan, maka peran mediasi variabel Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) dalam hal ini tergolong "memediasi parsial".

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) melalui Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1), dengan t statistik sebesar 5,003 atau dengan probabilitas sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) berperan memediasi pengaruh variabel investasi (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2). Oleh karena variabel pengeluaran pemerintah (X_2) berpengaruh langsung secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y_2), dan juga setelah dimediasi oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto

perkapita (Y_1) juga signifikan, maka peran mediasi variabel Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) dalam hal ini tergolong "memediasi parsial". Pengaruh variabel tenaga kerja (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2) melalui Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1), dengan t statistik sebesar 0,041 atau dengan probabilitas sebesar 0,976 Hal ini berarti bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1) tidak berperan memediasi pengaruh variabel tenaga kerja (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y_2).

Evaluasi terhadap Validitas Model

Validitas model struktural dapat dilihat dari R^2 dari variabel dependen. Nilai R^2 variabel dependen dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Evaluasi Terhadap Validitas Model

No	Variabel Dependen	Variabel Independen	R^2	Kemampuan Menjelaskan Variabel Independen
1.	Tenaga Kerja (X_3)	X_1, X_2	0,669	Kuat
2.	PDRB (Y_1)	X_1, X_2, X_3	0,970	Kuat
3.	Tingkat Kemiskinan (Y_2)	X_1, X_2, X_3, Y_1	0,984	kuat

Sumber: Lampiran 3

Validitas model struktural dapat dilihat dari R^2 dari variabel dependen. Untuk R^2 dalam penelitian ini terdapat 3 variabel dependen, yaitu tenaga kerja (X_3), Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1), dan tingkat kemiskinan (Y_2). Nilai R^2 dari variabel dependen, yaitu tenaga kerja (X_3), Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Y_1), dan tingkat kemiskinan (Y_2) lebih dari 0,667 maka tergolong "kuat", sesuai pendapat Chin (dalam Ghozali, 2011).

Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi total persamaan struktural dari model penelitian dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)(1 - R_3^2)$$

$$Q^2 = 1 - \{ (1 - 0,669) (1 - 0,970) (1 - 0,984) \}$$

$$Q^2 = 1 - \{ (0,331) (0,030) (0,016) \}$$

$$Q^2 = 0,99$$

Koefisien determinasi total sebesar 0,99 mempunyai arti bahwa sebesar 99 persen variasi dari tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan PDRB perkapita sedangkan sisanya, yaitu 1 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang dibentuk.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali, dapat disimpulkan : Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Tenaga kerja berpengaruh positif dan nonsignifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh nonsignifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui tenaga kerja pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah berpengaruh nonsignifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui tenaga kerja pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah di Provinsi Bali.

Investasi hendaknya diarahkan pada kabupaten/kota di wilayah Sarbagita yang memiliki investasi fisik yang rendah sehingga alokasi investasi tidak terpusat pada daerah tertentu dan alokasi investasi juga diharapkan merata di semua sektor. Pemerintah sebagai penyedia lapangan pekerjaan hendaknya lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan melalui pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

REFERENSI

- Adhisasmita. 2005. Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional : Indonesia 1992-2004. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. Vol. 9, No. 2, Hal: 129-142.
- BPS Kota Denpasar. 2009. Denpasar Dalam Angka Tahun 2008. Denpasar Kota
- BPS Provinsi Bali. 2015. Bali Dalam Angka Tahun 2014. Denpasar Kota

- _____. 2016. Bali Dalam Angka Tahun 2015. Denpasar Kota
- Cheyne, Christine, Mike O'Brien dan Michael Belgrave. 1998. *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction, Auckland*: Oxford University Press.
- Danielson, Michael, and Julian Wolpert. 1992. Rapid metropolitan growth and community disparities. Growth and Change From old to new metropolis. *In Research in Community Sociology*
- Elyani. 2010. Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Berinvestasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Vol 3 (1), 42-50.
- Ernawati . N. 2012. Pemetaan Potensi Penduduk Miskin Kabupaten Bantul, Jogjakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 1, (No.03) : 475-481.
- Fatas A, and Mihov I. 1998. *The Effects of Fiscal Policy on Consption and Employment: Theory and Evidence*. Seminar participants at Tilburg University, ECARES, University of Toulouse and The European Summer Symposium on International Macroeconomics
- Gatot, Setio Harijono. 2013. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 2, Februari 2013 (pp. 48 - 76).
- Gravitiani, Evi. 2006. Analisis Shift-Share Dinamik pada Perekonomian Kota Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 7(1): 35–48.
- Herman, E. 2011. *The Impact of Economic Growth Process on Employment in European Union Countries*. Year XIV No. 42. The Romanian Economic Journal.
- Hugan, Gao. 2012. *Co-integration Model of Logistics Infrastructure Investment and Regional Economic Growth in Central China*. *International Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering (ICMPBE2012)*. Volume:33, 2012, Pages: 1036–1041
- Lee, Sugie, Changkyu Choi and Wansoo Im. 2013. Metropolitan Growth Patterns and Community Disparities: Insights from the State of New Jersey. *Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning*, (SSCI). Hanyang University.
- Lewis, Oscar. 1954. *Micro Economic Theory A Mathematical Approach* Third Edition Singapore, Mc Graw-Hill International Book Co.
- Lubis, Pardamean. Afifudin, Sya'ad & Mahalli, Kasyful. 2008. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*. Vol.3 (2), 111-126.

- Mahsunah. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Nasional di Indonesia Tahun 2005-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 8 No.1. Hal: 39-48.Surakarta: USM.
- Nizar, Chairul. 2013. Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Issn 2302-0172 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kual. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Omoniyi. B, Benyamin. Omobitan. Olufunsho Abayomi 2011. *The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Nigeria*. *International Research Journal of Finance and Economic*. [Online] 73
- Omr, Kahouli. 2013.*The Nexus Among Foreign Investment, Domestic Capital And Economic Growth: Empirical Evidence From The MENA Region*. *Research In Economics* 68 (2014)257–263
- Pascual, M. & Álvarez-García, S. (2006) *Government Spending And Economic Growth In The European Union Countries: An empirical Approach*. JEL, <http://ssrn.org>.
- Rondinelli, Dennis A dan G. Shabbir Cheema. 1990. “*Implementing Decentralization Policies; An Introduction*”, dalam G. Shabbi Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Editors), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills/London/New Delhi:Sage Publication.
- Sianturi, 2007. Analisis Pengaruh Tingkat Investasi Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Jawa tengah (*tesis*). Megister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Suryawati, Criswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Multidimensional. *Jurnal Pelayanan Kesehatan: Vol 8 No 3 September 2005* , Hal 121-129